BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan adanya UMKM ini banyak rakyat Indonesia merasakan manfaatnya terutama pada pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan dengan adanya usaha kecil dan mikro ini sangat membantu dalam mengurangi tingkat pengangguran, penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Berkurangnya pengangguran yang ada terjadi saat ini sangat membantu negara dalam menambah pendapatan negara yang berupa pajak. Hingga saat ini usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih merupakan sektor unggul dalam memenuhi perekonomian Indonesia.

Situasi ini sudah terbukti dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2023 tercatat bagaimana peran sektor UMKM terhadap PDB yang meningkat secara terus-menerus menjadi sebesar 61% yang setara dengan Rp 9.580 triliun. Peran UMKM terhadap penyerapan total tenaga kerja nasional juga bagus, yaitu sebesar 97% atau sekitar 117 juta pekerja (Kemenkop UKM, 2023). UMKM di Indonesia pada tahun 2024 telah diperkirakan akan mencapai lebih dari 65 juta unit. UMKM yang tersebar di berbagai sektor, yaitu teknologi digital, fashion, kuliner, dan kerajinan tangan.

Namun, meskipun kontribusinya sangat berpengaruh besar, partisipasi pengusaha kecil dan mikro dalam sistem perpajakan nasional masih rendah. Tingkat kepatuhan

pajak pemilik usaha kecil dan mikro yang terdaftar sebagai Wajib Pajak masih jauh dari harapan Direktorat Pajak (DJP) (DJP, 2022). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Faktor- Faktor Yang Mempengaruhai Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Setiap wajib pajak yang memiliki usaha atau bekerja memiliki kesempatan untuk mengikuti NPWP, karena sering kali digunakan sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin usaha. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dan tidak dapat menjalankan usaha meskipun telah memenuhi persyaratan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan NPWP yang sesuai dengan tujuan bisnis wajib pajak masih perlu ditingkatkan.

Jumlah wajib pajak pada tahun 2023 yang diwajibkan melaporkan SPT tahunan mencapai 19,27 juta. Dari jumlah tersebut, 13,36 juta SPT telah dilaporkan, dengan lebih dari 95% di antaranya menggunakan saluran elektronik seperti e-Filing dan e-Form. Meskipun penggunaan layanan online meningkat, masih ada sekitar 489.000 wajib pajak yang melaporkan SPT secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun layanan elektronik semakin populer, masih ada tantangan dalam adopsi teknologi oleh semua wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menargetkan peningkatan pelaporan SPT melalui saluran elektronik. Pada 2023, terjadi pertumbuhan sekitar 2,8% dalam pelaporan SPT dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun jumlah pendaftar NPWP melalui internet mengalami peningkatan, antusiasme untuk memanfaatkan layanan ini masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Banyak wajib pajak yang menganggap bahwa dampak dari memiliki NPWP bisa menjadi beban, terutama karena proses penghapusan NPWP memerlukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu, yang dianggap memakan waktu dan rumit.

Banyak pekerja bisnis yang menganggap bisa terus menjalankan usaha tanpa memiliki NPWP dan ini turut mempengaruhi rendahnya tingkat pendaftaran NPWP melalui saluran digital. Muncul berbagai pemberitaan mengenai penyalahgunaan anggaran negara dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan penerimaan pajak. Hal ini memicu persepsi negatif di masyarakat terkait upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi perpajakan dan pendapatan negara. Ketidakpercayaan ini berpotensi menghambat partisipasi publik dalam kewajiban pajak, karena banyak yang meragukan penggunaan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat secara tepat dan transparan. Situasi ini menekankan pentingnya pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola anggaran dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan penerimaan pajak guna menjaga kepercayaan publik.

Permasalahan kondisi keuangan wajib pajak dalam hal perpajakan sering kali meliputi beberapa faktor kunci. Pertama, banyak wajib pajak, terutama dari sektor usaha kecil dan mikro, mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak akibat keterbatasan sumber daya finansial. Ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi

pendapatan dapat mengganggu kemampuan wajib pajak untuk merencanakan dan mengelola kewajiban pajak secara efektif.

Kedua, kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan dan strategi pengelolaan pajak yang tepat sering kali menyebabkan kewajiban pajak yang tidak terencana, yang dapat berujung pada keterlambatan pembayaran atau pelanggaran yang tidak disengaja. Ketiga, beban pajak yang dianggap tinggi dapat mempengaruhi arus kas (*cash flow*) wajib pajak, sehingga para pelaku usaha merasa tertekan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Secara keseluruhan, kondisi keuangan yang sulit dan kurangnya pengetahuan perpajakan dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak.

Modernisasi perpajakan memerlukan sistem teknologi yang canggih dan andal. Namun, di beberapa daerah, terutama yang terpencil, infrastruktur teknologi seperti akses internet yang stabil dan perangkat yang diperlukan masih terbatas. Hal ini menghambat implementasi digitalisasi administrasi pajak secara menyeluruh. Selain itu, terdapat resistensi terhadap perubahan dari pegawai dan wajib pajak yang enggan beradaptasi dengan sistem baru. Risiko keamanan data juga menjadi perhatian, karena penggunaan teknologi dapat mengakibatkan kebocoran informasi pribadi. Gangguan teknis dalam sistem digital sering menghambat proses pelaporan dan pembayaran pajak, sementara biaya implementasi yang tinggi diperlukan untuk pengembangan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia. Semua permasalahan ini

memerlukan perhatian serius agar modernisasi administrasi perpajakan dapat berjalan efektif.

Permasalahan pada sanksi perpajakan meliputi kurangnya pemahaman wajib pajak, ketidakseimbangan dalam beratnya sanksi, serta lemahnya penegakan hukum. Selain itu, adanya celah hukum yang dimanfaatkan untuk menghindari sanksi dan biaya kepatuhan yang tinggi juga menjadi kendala. Masalah-masalah ini dapat mengurangi efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan pajak. Banyak wajib pajak, terutama pengusaha kecil dan mikro, tidak memahami aturan perpajakan secara menyeluruh, sehingga mereka mungkin melanggar aturan tanpa sengaja. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi tentang sanksi belum maksimal.

Persepsi Tarif Pajak merujuk pada pandangan atau anggapan individu atau kelompok tentang besaran tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, besarnya tarif pajak berhubungan dengan *normative belief*, yaitu keyakinan normatif yang mencerminkan harapan yang dipersepsikan dari individu atau kelompok tertentu terhadap suatu perilaku. Keyakinan ini dapat memengaruhi motivasi seseorang untuk memenuhi kewajibannya. Tarif pajak sendiri merujuk pada persentase yang digunakan sebagai acuan dalam menghitung jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan (Cahyani & Noviari, 2019:1891). Dalam konteks perpajakan, persepsi ini dapat memengaruhi perilaku wajib pajak, termasuk keputusan untuk mematuhi atau menghindari kewajiban pajak. Pada pengusaha kecil dan mikro, persepsi terhadap tarif pajak

seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pemahaman tentang aturan pajak, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, serta beban ekonomi yang dirasakan akibat kewajiban pajak. Jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi atau tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, pengusaha kecil dan mikro mungkin merasa enggan untuk mendaftar sebagai wajib pajak.

Selain itu, pemberitaan mengenai kemiskinan dan ketimpangan juga dapat menimbulkan persepsi bahwa distribusi dana pajak kepada masyarakat tidak merata. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut di atas yaitu Kondisi Keuangan, Modernisasi Administrasi, Sanksi, Dan Persepsi Tarif Pajak mengenai kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dengan NPWP. Berdasarkan hasil survey dilakukan pada Wajib Pajak (WP) dalam lingkungan komersial tradisional. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan, yang terletak di Komplek Permata Niaga Bukit Indah, Adhya Building Tower Blok A 1 Sukajadi. Kantor ini dipilih karena berperan langsung dalam melayani wajib pajak.

Oleh karena itu, menarik untuk mendalami aspek sikap dan perilaku para pelaku usaha kecil dan menengah terkait peraturan perpajakan, khususnya kepatuhan pemilik usaha kecil Mikro dan Makro dalam memiliki NPWP karena pedagang eceran atau Pengusaha Kecil merupakan penyumbang potensi penerimaan Negara yang cukup besar. Faktor kepatuhan yang mencerminkan aspek-aspek tersebut dapat dilihat

sebagai isyarat bagi pemerintah untuk menyusun strategi menyeluruh yang bertujuan untuk mendorong pedagang eceran atau Pengusaha Kecil untuk memiliki NPWP.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tan & Pradita, 2020:3) yang berjudul Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian adalah Kondisi Keuangan pengaruh positif signifikan kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi pengaruh positif signifikan kepatuhan Wajib Pajak.

Selain penelitian diatas, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh (Ekonomi dan Bisnis & Andika Yudha, 2022) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian ini adalah Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kesadaran Pajak Dimoderasi Insentif Pajak.

Di samping penelitian tersebut, terdapat pula studi yang dilakukan oleh (Muniroh, 2023:5) yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendapatan, Persepsi Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Rembang. Hasil penelitian ini adalah Pengaruh yang cukup besar dan positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mengidentifikasi sejumlah permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi Keuangan yang sulit, kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan beban pajak yang tinggi dapat menghambat kemampuan wajib pajak, dalam memenuhi kewajiban pajak.
2. Sejauh mana Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam memiliki NPWP, khususnya di kalangan pengusaha kecil dan mikro.
3. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak, ketidakseimbangan sanksi, lemahnya penegakan hukum, dan adanya celah hukum, mengurangi efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan.
4. Persepsi Tarif Pajak memengaruhi pengusaha kecil dan mikro dalam memenuhi kewajiban pajak, yaitu persepsi negatif, seperti tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi dan dapat menghambat Pemilik Usaha Kecil Mikro dan Makro mendaftar sebagai Wajib Pajak.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang efisien. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana Kondisi Keuangan Wajib Pajak mempengaruhi keputusan mereka untuk memiliki NPWP.

2. Modernisasi Perpajakan menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang terbatas, resistensi terhadap perubahan, risiko keamanan data, gangguan teknis, dan biaya tinggi, yang semuanya perlu diatasi agar proses digitalisasi dapat berjalan efektif.
3. Penilaian tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang aturan pajak di kalangan Pengusaha Kecil dan Mikro.
4. Faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Persepsi Tarif Pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang ada, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Kondisi Keuangan Wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan dalam memiliki NPWP?
2. Apakah Modernisasi Administrasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan dalam memiliki NPWP?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan dalam memiliki NPWP?
4. Apakah Persepsi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan dalam memiliki NPWP?

5. Apakah Kondisi Keuangan, Modernisasi Administrasi, Sanksi Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memiliki NPWP?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kondisi Keuangan Wajib Pajak (WP) mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Untuk mengetahui Modernisasi Administrasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam memiliki NPWP.
3. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam memiliki NPWP.
4. Untuk mengetahui persepsi WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam memiliki NPWP.
5. Untuk mengetahui Kondisi Keuangan, Modernisasi Administrasi, Sanksi Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan dalam memiliki NPWP.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dihasilkan diantaranya:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini akan memperkaya teori tentang pengaruh kondisi keuangan individu terhadap kepatuhan pajak.
2. Studi ini akan menambah pemahaman teoretis tentang bagaimana modernisasi sistem administrasi perpajakan, seperti digitalisasi atau layanan online, berpengaruh pada kepatuhan pajak.
3. Penelitian ini akan memperkuat teori tentang efektivitas sanksi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan.
4. Studi ini akan memperluas pemahaman teoritis tentang bagaimana persepsi WP terhadap pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang perpajakan dan dapat memperkaya literatur akademis terkait.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

Dapat meningkatkan pelayanan dan komunikasi kepada wajib pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Dapat memberikan informasi yang berguna bagi wajib pajak tentang pentingnya pemahaman akan kewajiban perpajakan, modernisasi administrasi, dan sanksi pajak

4. Bagi Universitas Putera Batam

Dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dan penelitian selanjutnya oleh dosen dan mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang perpajakan dan keuangan.

5. Bagi Peneliti Lain

Dapat menjadi dasar untuk mengeksplorasi topik-topik lain yang relevan dalam konteks kepatuhan perpajakan.